

ABSTRAK

PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh

Arifa Vika Jannah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewenangan pemerintah dalam perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam proses untuk memperoleh izin.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan didukung data sekunder. Penelitian yuridis empiris diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta observasi lapangan terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam proses perizinan UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara normatif telah berjalan sesuai ketentuan hukum, namun efektivitasnya masih terkendala oleh faktor struktural, teknis, dan sosial. Kendala tersebut meliputi keterbatasan kapasitas aparatur, infrastruktur digital yang belum merata, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya perbaikan seperti pelatihan OSS, penerapan pelayanan “*jemput bola*”, penguatan koordinasi antarinstansi, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Terdapat beberapa saran yang diajukan yaitu, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan DPMPTSP dengan menitikberatkan pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan pelayanan publik. Selain itu Masyarakat pelaku usaha perlu menumbuhkan kesadaran bahwa kepemilikan izin bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk perlindungan dan peluang ekonomi.

Kata Kunci: Perizinan, UMKM, Kewenangan, DPMPTSP

ABSTRACT

MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISE LICENSING IN EAST OGAN KOMERING ULU REGENCY SOUTH SUMATRA PROVINCE

By

Arifa Vika Jannah

This study aims to analyze the government's authority in licensing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in East Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra Province, and the obstacles faced by MSMEs in the permit obtaining process.

This research is an empirical legal-legal study supported by secondary data. The empirical legal research was obtained through interviews with officials from the Investment and One-Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP) and field observations of MSMEs in East Ogan Komering Ulu Regency.

The results indicate that the local government's authority in the MSME licensing process in East Ogan Komering Ulu Regency has been operating in accordance with legal provisions, but its effectiveness is still hampered by structural, technical, and social factors. These obstacles include limited capacity of civil servants, uneven digital infrastructure, and low public legal literacy. Despite this, local governments have undertaken various improvement efforts, such as OSS training, the implementation of "jemput bola" (outreach) services, strengthening inter-agency coordination, and providing legal education to the public.

Several suggestions were made, Local governments need to strengthen the institutional capacity of the DPMPTSP (Directorate General of Public Works and Public Housing) by emphasizing human resource competency development in information technology and public services. Furthermore, business communities need to raise awareness that permit ownership is not merely a legal obligation but also a form of protection and economic opportunity.

Keywords: *Licensing, MSMEs, Authority, DPMPTSP*